

PERAN BAKAMLA DALAM PENANGANAN KEAMANAN LAUT DI ZONA MARITIM BARAT

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Terapan dalam Ilmu Administrasi Negara**

OLEH:

**NAMA : AGUS ARYANTO
NPM : 1831020117
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN NEGARA**



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

SKRIPSI

PROGRAM SARJANA TERAPAN

POLITEKNIK STIA LAN

JAKARTA

2022

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : AGUS ARYANTO
NPM : 1831020117
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN BAKAMLA DALAM PENANGANAN KEAMANAN LAUT DI ZONA MARITIM BARAT

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada *Jakarta 10 Juli* 2022

Pembimbing



Alih Aji Nugroho, S.AP., MPA

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta di Jakarta pada 18 Juli.....2022.



Ketua merangkap anggota,

Dr. Firman Hadi Rivai.,MPA.

Sekretaris merangkap anggota,

Hidayaturahmi,S.Sos.,MPA.

Anggota,

Alih Aji Nugroho, S.AP., MPA.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Aryanto
NPM : 1831020117
Jurusan : Administrasi Negara
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini dengan judul Peran Bakamla dalam Penanganan Keamanan laut di Zona Maritim Barat, merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 18 Juli 2022
Penulis,



Agus Aryanto

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, Dengan memanjatkan puji syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penulis, baik kesempatan maupun kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang telah kami buat berjudul *Peran Bakamla dalam Penanganan Keamanan Laut di Zona Maritim Barat*. Skripsi ini dapat hadir seperti sekarang ini tak lepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu sudah kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besar kepada semua pihak dan yang telah berjasa membantu penulis selama proses pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Peneliti menyadari bahwa penulis skripsi ini jauh dari kata sempurna sebagai manusia makhluk ciptaan Nya tak pernah luput dari kesalahan dan kekurangan, dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan dan data yang dimiliki oleh penelitian terutama dalam pembuatan skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Bapak Alih Aji Nugroho, S.AP., MPA. atas kesediaannya dalam membimbing kami, sampai ujian hari ini. juga kami sampaikan terima kasih kami kepada :

1. Ibu Direktur Poltek STIA LAN Jakarta;
2. Para Wakil Direktur;
3. Para Dosen (Pengajar) maupun Tenaga Administrasi Poltek STIA LAN Jakarta;

4. Teman-teman kami seangkatan;
5. Seluruh Pihak yang telah mebantu kami dalam penulisan skripsi kami;
6. Teruntuk kepada kedua orang tua kami dan Istri tercinta Dina Wijaya atas doa dan dukungannya setiap saat pada kami dalam menyelesaikan Studi dan juga anak-anak kami tercinta Navya dan si kembar Randra-Randri yang menjadi penyemangat bagi saya dalam mengikuti pendidikan di Poltek STIA LAN Jakarta.

Sekali lagi, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pembuatan proposal penelitian ini. Maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan proposal ini sehingga bermanfaat bagi mahasiswa dan penulis sendiri.

Jakarta, 2022

Agus Aryanto

ABSTRAK

Agus Aryanto,1831020117

PERAN BAKAMLA DALAM PENANGANAN KEAMANAN LAUT DI ZONA MARITIM BARAT.

Skripsi,120 halaman

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan penanganan keamanan di perairan laut Indonesia khususnya di zona maritim barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen, wawancara, dan observasi. Dalam hal ini penulis melakukan observasi terhadap masih rendahnya keamanan laut di zona maritim barat dengan beberapa kali mengikuti dan mendampingi kegiatan pimpinan di zona maritim barat, serta melakukan wawancara terhadap *key informant* yang semuanya pernah tugas di Batam khususnya serta membaca laporan atau jurnal yang dilaporkan kepada pimpinan di Bakamla pusat.

Hasil penelitian ini menemukan permasalahan permasalahan bahwa peran Badan Keamanan Laut belum efektif dan keamanan laut di zona maritim barat masih rendah di karenakan, dalam melaksanakan penanganan keamanan di perairan laut Indonesia, yang dilaksanakan oleh Badan Keamanan Laut selama tahun anggaran 2021 dikarenakan adanya pemotongan anggaran oleh pemerintah. Bila dibandingkan dengan kompleksitas tuntutan dan tantangan keamanan dan keselamatan perairan laut Indonesia yang luasnya mencapai lebih kurang 5,8 juta km² dengan kondisi geografis negara kepulauan yang terdiri dari 17.054 pulau, maka peran badan keamanan laut dalam melaksanakan penanganan keamanan di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia perlu ditingkatkan.

Konsep baru yang didapat dari analisis peran badan keamanan laut dalam melaksanakan keamanan laut di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia tidak bisa dilakukan sendiri harus bersama sama dengan *stakeholder* yang mempunyai wewenang di laut serta anggaran yang cukup dari APBN untuk memperkuat armada kapal patroli bakamla bertambah dan dapat beroperasi dengan baik di dukung oleh anggaran yang memadai semua itu untuk menjaga keamanan perairan dan dilaut dan wilayah yuridiksi Indonesia.

Serta dengan *Good Maritime governance* dalam hal ini yakni kerjasama antar *stakeholder* dengan kata lain semua pemangku kepentingan yang berwenang di laut, khususnya di wilayah kerja kantor bakamla zona maritim barat, menjadi poin penting dan menjadi perhatiandalama rangka mewujudkan peran Bakamla dalam penanganan keamanan laut dengan melakukan patroli ke daerah rawan yang sering kali terjadinya pelanggaran tindak pidana di laut guna terciptanya *good maritime governace*.

Kata kunci: Peran Badan keamanan laut, penanganan keamanan laut, *Good maritime governance*

ABSTRACT

Agus Aryanto, 1831020117

**BAKAMLA'S ROLE IN MARINE SAFETY HANDLING IN THE WEST
MARITIME ZONE.**

Essay, 120 pages

The purpose of this research is to find out the role of the Maritime Security Agency in implementing security handling in Indonesian marine waters, especially in the western maritime zone.

The method used in this research is a qualitative approach. Data were collected through document review, interviews, and observations. In this case, the author observes the low level of maritime security in the western maritime zone by following and accompanying leadership activities in the western maritime zone, as well as conducting interviews with key informants who have all served in Batam in particular and read reports or journals reported to the leadership, in central Bakamla.

The results of this study found problems that the role of the Maritime Security Agency was not yet effective and sea security in the western maritime zone was still low because, in carrying out security handling in Indonesian marine waters, which was carried out by the Maritime Security Agency during the 2021 fiscal year due to budget cuts by the Government. When compared with the complexity of the demands and challenges for the security and safety of Indonesian marine waters, which covers an area of approximately 5.8 million km² with the geographical condition of an archipelagic country consisting of 17,054 islands, the role of marine security agencies in carrying out security handling in Indonesian marine waters and territories Indonesian jurisdiction needs to be improved.

The new concept obtained from the analysis of the role of the marine security agency in carrying out maritime security in Indonesian marine waters and Indonesian jurisdictions cannot be carried out alone, it must work together with stakeholders who have authority at sea and sufficient budget from the APBN to strengthen the Bakamla patrol boat fleet increases. And can operate properly, supported by an adequate budget, all of which are to maintain the security of the waters and seas and the Indonesian jurisdiction.

As well as Good maritime governance in this case, namely cooperation between stakeholders, in other words, all stakeholders who are authorized at sea, especially in the working area of the Bakamla office in the western maritime zone, become an important point and become a concern in order to realize Bakamla's role in handling

maritime security by conducting patrols. To areas prone to frequent violations of criminal acts at sea in order to create good maritime governance.

Keywords: The role of maritime security agencies, handling security at sea, Good maritime governance

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Fokus Permasalahan	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
1. Tujuan Penelitian	18
2. Manfaat Penelitian.....	18
BAB II KERANGKA TEORI	19
A. Tinjauan teori.....	19
1. Teori dan Konsep Peran Organisasi	19
2. Teori <i>Maritime Governance</i> dalam pengelolaan kemaritiman Indonesia	22
B. Konsep Kunci.....	29
C. Model Berpikir.....	31
D. Pertanyaan Penelitian.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Metode Penelitian.....	33
B. Teknik Pengumpulan Data.....	35
1. Metode Pengumpulan data	35
2. Sumber dan Jenis Data.....	40

C. <i>Pengolahan Data</i>	41
1. Teknik Pengolahan Data	41
2. Teknik Analisis Data	41
D. Uji Keabsahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	45
A. Analisis Peran Bakamla	45
1. <i>Peran Operasional Bakamla di Perbatasan</i>	50
2. <i>Peran Bakamla dalam Pengamanan</i>	53
3. <i>Peran Bakamla dalam Operasi khusus</i>	58
4. <i>Peran Operasi Bakamla dalam Penegakan Hukum</i>	60
B. Peran Bakamla dilihat dari Perspektif Maritim Governance	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	91
KESIMPULAN.....	91
SARAN	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	101
Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian.....	102
Pedoman Telaah Dokumen	103
Pedoman Wawancara	104
Daftar Pertanyaan dan Key Informant	105
Foto Wawancara.....	115
Observasi.....	118
Struktur Organisasi Bakamla	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	120

J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tata Waktu Penelitian.....	34
Tabel 2: <i>Key Informant</i> Penelitian.....	39
Tabel 3: PELANGGARAN YANG TERJADI SELAMA 2020 DI PERAIRAN WILAYAH BARAT.....	87



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Model Berpikir.....	31
Gambar 2 : Komponen Analisis Data Model Miles dan Huberman	42
Gambar 3 : Standar Operasional Prosedur Bakamla	53
Gambar 4 : Pelaksanaan Operasi.....	57
Gambar 5 : Komunikasi dan koordinasi kepada para stakeholder	60
Gambar 6 : Unsur Operasi	69
Gambar 7 : Hasil Operasi	69
Gambar 8 : Program Kegiatan Ditopsla TA 2021	70
Gambar 9 : <i>STAKEHOLDER</i> BAKAMLA	73
Gambar 10 : Pelanggaran yang terjadi selama 2020 di perairan wilayah barat.....	88

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara terbesar kedua di dunia dan kepulauan terbesar di Asia adalah Indonesia. Dengan luas wilayah lebih dari 7,7 juta km², termasuk perairan lebih dari 5,8 juta km² dan garis pantai lebih dari 81.000 km, terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil. 200 mil laut merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. (Alimuddin & Supriadi, 2011), Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Benua Asia, dan Benua Australia semuanya memiliki mata rantai komunikasi yang menyatu di dalam dan sekitar Indonesia, menghubungkan kepentingan negara-negara maju dan besar di barat, timur, utara, dan selatan. Jadi, Indonesia sangat penting secara strategis, terutama dari sudut pandang ekonomi dan militer. Selain berfungsi sebagai jalur strategis kelautan, salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya laut yang cukup besar adalah Indonesia, baik sumber daya mineral yang terendam di dalam air maupun sumber daya berupa ikan dan sejenisnya (Laporan kegiatan FGD Direktorat Kebijakan. 2020).

Selain itu, Indonesia semakin menunjukkan potensi sumber daya alamnya berkat keberadaan 2/3 wilayah laut Indonesia. Sejalan dengan itu, diyakini bahwa pengendalian eksplorasi dan eksploitasi yang tidak tepat dapat menyebabkan konflik pengelolaan dan mempengaruhi keseimbangan ekosistem laut. Masih

banyaknya permasalahan atau pelanggaran pelanggaran di wilayah zona maritim barat seperti, menurunnya kontribusi Bakamla dalam menjaga keamanan maritim di zona maritim barat berpengaruh terhadap *illegal fishing* dan kejahatan transnasional(Alimuddin & Supriadi, 2011).

Peran Bakamla saat ini adalah sebagai koordinator institusi terkait pelanggaran hukum di laut atau perairan yuridiksi Indonesia, Indonesia memiliki tujuh lembaga penegak hukum dengan satuan tugas patroli di laut untuk mempertahankan wilayah laut yang sangat besar ini. TNI Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Polisi Perairan, Hubla Kementerian Perhubungan, PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Bakamla, dan Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing* termasuk di antara organisasi penegak hukum yang mempunyai kewenangan di laut (Wasisto. G. 2015).

Sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, ketujuh lembaga penegak hukum tersebut melakukan patroli yang berkaitan dengan keamanan laut secara sektoral. Jelas bahwa tata kelola kelautan Indonesia tidak ideal, tetapi lebih baik dari sebelumnya. Negara hadir di laut melalui Bakamla, melakukan perlindungan, pengawasan, pencegahan, dan penghukuman terhadap pelanggaran hukum di wilayah dan perairan Indonesia. Dalam rangka memenuhi kewajibannya yaitu patroli untuk keselamatan dan keamanan di perairan Indonesia dan di bawah

yurisdiksi Indonesia, Bakamla melakukan berbagai tanggung jawab. (Badan Informasi Geospasial, 2021).

Melalui tanggung jawabnya, Bakamla juga membantu mewujudkan niat negara untuk memantapkan dirinya sebagai kekuatan maritim global. Konsep strategis yang dikenal sebagai poros laut dilaksanakan untuk menjamin keterhubungan antar pulau, pertumbuhan industri pelayaran dan perikanan, peningkatan transportasi laut, dan penekanan pada keamanan maritim (Wangke, 2018). Inisiatif utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi untuk menetapkan Indonesia sebagai poros maritim dunia antara lain menegakkan kedaulatan wilayah maritim Republik Indonesia, menghidupkan kembali sektor ekonomi kelautan, meningkatkan dan mengembangkan konektivitas maritim, memperbaiki kerusakan lingkungan, melestarikan keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kelautan (KOMINFO, 2016).

Lahirnya Bakamla pada tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (sebagai lembaga pemerintah nonkementerian/LPNK). Seperti diketahui secara luas, Bakamla merupakan “metamorfosis” dari Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut) yang telah berdiri sejak tahun 1972, dan sesuai dengan jalur reformasi pemerintah Indonesia yang resmi dimulai pada tahun 2010. Saat itu, Dipastikan status Bakorkamla sebagai lembaga non struktural/LNS membuatnya

kurang mampu menyelesaikan sejumlah persoalan. Meskipun namanya "badan koordinasi", mengimplementasikan masalah koordinasi bukanlah tugas yang sederhana (Reza, 2017).

Undang-undang yang mengatur perubahan nama dari Bakorkamla menjadi Bakamla menunjukkan keinginan pemerintah (Presiden) untuk memperkuat kemampuan Bakamla dalam mengatur dan membuat undang-undang. Dukungan kapal patroli, tindakan pengendalian, operasi bilateral, dan implementasi hasil pembicaraan bilateral kedua negara diperlukan agar Bakamla dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam menjaga laut Indonesia yang berbatasan dengan perairan negara lain. Tidak heran jika Indonesia memiliki begitu banyak batas perairan dengan perairan negara lain mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang dibatasi oleh perairan dan laut, seperti wilayah perairannya dengan Malaysia dan Singapura (Limbong, 2015:119).

Sebuah kesepakatan bersama yang disebut "*Agreement of Safety of Navigation in the Straits of Malacca and Singapore*" ditandatangani pada tanggal 24 Februari 1977, untuk menjamin keselamatan kapal yang lewat serta keamanan laut dari tiga negara pantai, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa setiap kapal yang membawa muatan berat dan mendekat dari kedalaman 15 meter harus mengikuti aturan koridor yang ditentukan; jalur ini membentang dari *Buffalo Rock* ke daerah sekitar Pulau Batu dan kembali lagi. Pemerintah disadarkan akan pentingnya wilayah laut bagi

kedaulatan negara dengan perbandingan ukuran laut dengan daratan. Mengingat Indonesia terletak di pusat komersial global dan jalur perdagangan maritim Asia Tenggara yang padat, posisi ini sangat penting bagi negara. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 mensyaratkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya alamnya dan menjaganya dalam kondisi yang baik agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Laut luas yang mengelilingi Indonesia, terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote, menghadirkan kesulitan terbesar untuk melakukan operasi patroli di laut Indonesia (Nazli, 2016).

Ada banyak ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik yang bersifat konvensional maupun non-konvensional. Ancaman konvensional meliputi pencaplokan wilayah Indonesia oleh negara-negara tetangga dan upaya disintegrasi. Ancaman non-konvensional termasuk *illegal unreported and unregulated (IUU) fishing*, imigran tidak berdokumen, dan *illegal Fishing* sering dilakukan oleh perusahaan kriminal internasional terorganisir, termasuk perdagangan obat-obatan, senjata, dan manusia. Patroli yang biasanya dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan pokok-pokok dan tujuan satgas menjadi salah satu kendala dalam melakukan operasi patroli laut dan pengamanan wilayah laut (Imran, 2014).

Selain itu, belum adanya standarisasi fasilitas dan gagasan patroli laut terpadu, serta belum adanya koordinasi antar instansi terkait optimalisasi dari

fasilitas untuk operasi patroli di laut. Berdasarkan kesepahaman dan kemauan bersama untuk mewujudkan pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan maritim terpadu yang efektif dan efisien di perairan pesisir Indonesia. Masalah atau bahaya yang saat ini ada di zona maritim barat yang dapat membahayakan keamanan maritim, karena rendahnya peran Bakamla di Zona maritim barat yang sering kali terjadi adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya ancaman kekerasan seperti terorisme, pembajakan, dan perusakan infrastruktur penting;
2. Masih adanya risiko navigasi, seperti cuaca buruk dan kapal karam di laut.
3. Masih adanya ancaman terhadap sumber daya laut, seperti bom ikan, tumpahan minyak, dan keracunan ikan, dan;
4. Masih banyaknya bahaya melanggar hukum, seperti melalui illegal logging, penangkapan ikan, atau penyelundupan produk terlarang (KOMINFO, 2016).

Dari Hal tersebut diatas terlihat jelas bahwa peran bakamla dalam penanganan keamanan laut di zona maritime belum maksimal karena masih terjadi pelanggaran pelanggaran yang terjadi khususnya di zona maritim barat (Laporan Operasi Laut 2021) dan dari permasalahan tersebut maka tanggung jawab Bakamla adalah melakukan operasi patrol, sesuai dengan standar operasi untuk mengatasi masalah atau ancaman, khususnya di zona maritim barat yaitu sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut No 17 tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Keamanan Laut, serta tujuan operasi, yaitu mereka yang melanggar hukum di laut dan melakukan kejahatan di laut (Perkaba no 8, 2017).

Standar dan tujuan peran Bakamla dalam mengelola keamanan maritim, terutama dalam mendekati perairan yuridiksi Indonesia, telah ditetapkan dengan jelas kepada pelaksana dan pemangku kepentingan. Bakamla mengelola keamanan maritim di zona maritim barat di bawah arahan Badan keamanan laut dikantor pusat Jakarta. Secara finansial, seluruh kegiatan Bakamla dibiayai melalui APBN, yang masih jauh dari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan operasional. Bakamla juga mengelola keamanan maritim di wilayah kerja Bakamla di zona maritim barat khususnya zona laut barat.

Peran Bakamla dalam penanganan keamanan maritim di wilayah kerja kantor Bakamla di zona maritim barat memiliki berbagai faktor permasalahan, antara lain faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi derajat *joint operating power* Bakamla yaitu faktor yang berasal dari dalam Bakamla itu sendiri dan faktor-faktor yang berasal dari luar Bakamla di zona maritim barat. Peran Bakamla secara keseluruhan dalam mengelola keamanan maritim di zona maritim barat dapat dipahami dari perspektif sejauh mana visi dan misi Bakamla tentang peran Bakamla dalam mengelola keamanan maritim di wilayah kerja dikantor Bakamla di maritim barat telah tercapai, meskipun belum sepenuhnya,

terutama di daerah perbatasan (Marsetio, 2014). Hal ini terlihat dari penurunan pelanggaran atau kejahatan laut, khususnya di zona maritim barat. Dipahami bahwa ini terkait erat dengan tujuan dan fungsi sistem peringatan dini saat ini (Marsetio, 2014).

Keterlibatan Bakamla dalam mengelola keamanan maritim di zona maritim barat, contohnya KN, Pulau Marore Bakamla menyita dua kapal tanker sangat besar milik Iran dan Panama dan dituduh mengangkut minyak (bahan bakar minyak) secara ilegal. Dia sengaja mematikan Ais dan menutupi nama lambung kapal dengan kain untuk mengelabui aparat penegak hukum Indonesia (Astungoro & Puspita, 2021). Saat ini kebutuhan keamanan laut bagi masyarakat maritim sangat besar karena berkorelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keamanan laut memastikan bahwa Indonesia dapat menegaskan otoritasnya dalam hubungan internasional. Akibatnya, diperlukan penegakan hukum yang dapat melaksanakan keinginan masyarakat pengguna laut. Penerapan manajemen keamanan dan keselamatan di laut yang terintegrasi, yang diharapkan dapat menjadi penegakan hukum yang terintegrasi, merupakan salah satu yang diharapkan mampu menangani permasalahan di laut (Laporan operasi laut, 2021).

Hal ini dapat mengefektifkan penegakan hukum di perairan Indonesia dan perairan yurisdiksi Indonesia dengan memperhatikan keinginan dan harapan masyarakat pengguna laut. Jika semua komponen Bakamla dan pemangku

kepentingan di laut atau pemangku kepentingan bekerja-sama tanpa ada yang mendominasi, maka tata kelola maritim atau tata kelola kolaboratif yang efektif tidak hanya dapat tercapai. Oleh karena itu, sebagai kebutuhan utama untuk mengembangkan tata kelola *strong maritime governance*, sangat penting untuk memperkuat fungsi mereka yang terpisah dan hubungan antar pemain (Marsetio, 2014).

Bakamla, yang sering dikenal sebagai Penjaga pantai Indonesia, adalah entitas sipil yang bertugas menegakkan hukum di perairan Indonesia. Pertahanan laut Indonesia masih rumit secara teori tetapi tidak dalam kenyataan. Pertahanan laut Indonesia didukung oleh kerangka hukum tata kelola maritim yang diatur pada undang - undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan dan UU nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Status ini masing-masing mencantumkan dua organisasi berbeda sebagai penjaga pantai atau penegak hukum di laut. Meskipun ditetapkan sebagai penjaga laut dan pantai di bawah undang-undang pelayaran KPLP, Bakamla diwajibkan menurut undang-undang maritim untuk memenuhi tugasnya sebagai penjaga keamanan laut Indonesia (Nina, 2018).

Terkait dengan lembaga penegak hukum maritim lainnya yang masing-masing melakukan tugas patroli di laut, Bakamla memiliki beberapa masalah yang sangat signifikan. Karena institusi yang terlibat dalam keamanan dan pertahanan laut masih bersifat sektoral, kebijakan Indonesia tidak berubah. Ada

ketidaksepakatan tentang cara terbaik untuk menggunakan otoritas pertahanan dan keamanan laut yang dimiliki oleh entitas pemerintah. Indonesia, negara maritim, tidak memiliki lembaga penegak hukum maritim yang kuat yang sebanding dengan Penjaga Pantai Malaysia dan Penjaga Pantai AS, yang keduanya memiliki lembaga satu atap. Akibatnya, penanganan pelanggaran hukum di perairan kita seringkali tidak memadai (Kartika. S. D. 2016).

Laut adalah sentral bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memandang laut sebagai pemersatu pulau-pulau di Nusantara. Laut juga dipandang sebagai sumber kekayaan bangsa untuk pembangunan ekonomi. Di samping itu, laut juga dapat berperan sebagai medium pertahanan bangsa. Oleh sebab itu, penting bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas dan keamanan maritim. Wilayah laut yang luas juga memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Laut Indonesia rawan terhadap tindakan-tindakan kejahatan. Tindakan-tindakan seperti *terorisme*, pembajakan kapal, perampokan bersenjata, penyelundupan obat-obatan berbahaya, dan lainnya senantiasa menjadi perhatian utama keamanan maritim Indonesia. Selain tindakan-tindakan tersebut, wilayah laut Indonesia juga rawan terhadap eksploitasi ilegal sumber daya alam seperti IUU *fishing* dan pencemaran lingkungan. Sebagai gambaran, Indonesia sendiri mengalami kerugian paling tidak Rp 100 triliun per tahun akibat tindakan-tindakan kejahatan tersebut. Untuk itu, Indonesia perlu meningkatkan pengawasan laut secara keseluruhan. Dalam rangka mengatasi

ancaman-ancaman di atas, diperlukan kesamaan pandangan dari berbagai instansi dan lembaga terkait terhadap konstruksi keamanan maritim yang sejalan dengan kepentingan Indonesia. Kesamaan pandangan tersebut dapat terbangun melalui proses identifikasi bersama terkait pemahaman tentang potensi laut nasional, dinamika dan perkembangan kawasan serta negara-negara yang menjadi tetangga Indonesia, kekuatan Indonesia (terutama terkait dengan posisi strategis Indonesia), serta ancaman-ancaman utama keamanan maritim Indonesia (Cassidy, F. 2016).

Sumber daya kelautan merupakan keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara kepulauan yang secara geografis terbentang antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi ini yang meletakkan Indonesia berada di tengah persaingan politik global yang kini bergeser dari Transatlantik menuju Indo Pasifik.¹¹ Sebagai negara kepulauan luas daratan Indonesia sekitar 1,919 juta km² dengan jumlah pulau 17.504 pulau dan memiliki garis pantai sepanjang 99.093 km. Dari segi kelautan Indonesia memiliki kurang lebih 3,351 juta km² wilayah laut (perairan pedalaman, kepulauan, dan laut territorial) dan kurang lebih 2,936 juta km² wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landasan kontinen (Djajaatmadja, B. I. 2006)

Secara domestik komitmen terhadap pembangunan kelautan yang berkelanjutan telah di mulai paska konferensi Rio de janero tahun 2012. Pada pertemuan tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam

pidatonya menyatakan bahwa “For Indonesia, Blue Economy is Our Next Frontier”. Sejak saat itu Ekonomi Biru menjadi konsep besar pembangunan nasional. Untuk mendukung kebijakan tersebut SBY melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun strategi agar Ekonomi Biru mampu memberikan perubahan dalam paradigma pengelolaan ekonomi kelautan Indonesia. (Kementerian Kelautan, 2012)

Tata kelola di wilayah laut juga dipersulit oleh birokrasi yang lemah dan tidak adanya peta jalan dan pedoman pemerintah yang jelas. Karena perbedaan tujuan, kebijakan, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang digunakan oleh masing-masing instansi dan kementerian terkait, serta kurangnya sistem yang terintegrasi dan struktur komando dan kontrol tunggal, pencapaian ini akan menjadi tantangan. Ungkapan "*Multi Agency Single Task*" masih digunakan dalam sistem hukum Indonesia saat ini. di mana berbagai entitas, masing-masing dengan otoritasnya sendiri, menangani masalah keamanan maritim. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dan operasi otoritas penegakan hukum maritim dilakukan dengan cara yang sama. Pemberlakuan sistem "*Multi Agency Single Task*" tentu saja mengakibatkan kerugian pada anggaran pendapatan dan belanja negara serta ekonomi maritim, selain kerugian dalam penegakan hukum dari satu organisasi keamanan maritim, yaitu:

1. Persepsi dunia internasional tentang kompetensi Indonesia semakin menurun akibat ancaman beberapa negara untuk menemani kapal

dagangnya dengan kapal perang karena ketidakmampuan Indonesia menjaga perdamaian dan keamanan di laut, khususnya di Selat Malaka, sebagai SLOT.

2. Akibat penyelundupan dan pencurian sumber daya alam yang terus berlanjut, serta hilangnya nyawa manusia dan kerusakan lingkungan laut dan pesisir, Indonesia terpaksa menanggung kerugian pemerintah yang sangat signifikan.
3. Pembangunan kapal patroli dan pengelolaan sistem penegakan hukum multi-lembaga didanai secara tidak efisien menggunakan dana negara.
4. Karena prevalensi perompakan bersenjata dan kapal, laut Indonesia telah dianggap oleh beberapa organisasi internasional dan regional sebagai lokasi navigasi laut paling berbahaya di dunia, yang telah menaikkan biaya asuransi laut. Aksi bersama yang dikoordinasikan oleh Bakamla dengan sistem komando terpadu atau gagasan "single agency multi-task" diperlukan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan isu-isu tersebut (Nina, 2018).

Sebagai koordinator yang bertugas mengoordinasikan lembaga-lembaga lain di bawahnya, Bakamla dipilih. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi kepada Ketua Rapat Terbatas (Ratas) Bakamla dalam telekonferensi Maret 2020 yang juga dihadiri Wakil Presiden KH Maruf Amin, para menteri dari Kabinet Indonesia Maju, dan pejabat lembaga negara (Victoria, 2020).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., juga melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Keamanan Laut yang akan menjadi dasar bagi RUU Keamanan Laut. Bakamla Indonesia yang nantinya akan diubah menjadi Coast Guard Indonesia dalam keadaan perang, bisa menjadi komponen cadangan untuk mendukung TNI Angkatan Laut, yang nantinya bisa dikuasai Panglima TNI pada Maret 2020, menurut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. pada kesempatan yang sama selama *teleconference* (Victoria, 2020).

Sistem “*Single Agency Multi Tasks*” dapat digunakan dengan memaksimalkan semua kekuatan, kewenangan, dan kapabilitas pemangku kepentingan secara sinergis tanpa menghilangkan pemangku kepentingan saat ini, peran utama mereka, atau undang-undang dan peraturan yang memberi mereka kekuatan. Dengan menyatukan atau menyatukan kewenangan Karena komando dan kendali berada dalam satu tangan (bukan sektoral) dalam satu instansi, maka akan lebih mudah untuk berkoordinasi dan mengelola. Bakamla juga menghadapi dua aspek tantangan lagi dalam menjalankan keamanan maritim, yaitu masalah internal dan eksternal.

Ada beberapa persoalan tentang bagaimana Bakamla menangani keamanan maritim di zona laut barat yang ditangani oleh badan keamanan laut, tetapi masalah ini tidak dapat dipisahkan dari bagaimana Bakamla tumbuh dari waktu ke waktu, meningkat, dan berinteraksi dengan masyarakat setempat dan

pihak berwajib dan *stakeholder*. Memperluas peran Bakamla dalam mengelola keamanan maritim di zona maritim barat, Batam, dalam hal ini pelaksana dan pemangku kepentingan yang memiliki otoritas di laut. Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui keterlibatan dan penanganan peran Bakamla dalam mengelola keamanan maritim di zona maritim barat dan tata kelola keamanan di laut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Zona Maritim Barat Batam salah satunya adalah konflik LCS yang mulai “menyeret” Indonesia sejak tahun 2010, setelah Tiongkok mengklaim wilayah utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sementara itu, Tiongkok beralasan pihaknya berhak atas perairan di Kepulauan Natuna atas dasar argumen traditional fishing zone. 7 Klaim sepihak Tiongkok atas perairan Natuna masih terus berlanjut hingga membawa Indonesia dan Tiongkok pada situasi “bersitegang” pada tahun 2013 dan mencapai puncaknya tahun 2016. Pada Maret, Mei, dan Juni 2016 tercatat sejumlah kapal-kapal nelayan Tiongkok berlayar memasuki wilayah ZEE Indonesia dan melakukan sejumlah kegiatan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing). Insiden tersebut kembali terjadi pada tahun 2019 dan 2020, dimana kali ini tidak hanya kapal-kapal nelayan yang terlibat, tetapi coast guard Tiongkok juga melakukan pelanggaran serupa (Fransisca, 2020).

Mengenai persoalan ini Bakamla RI juga dikerahkan untuk mendukung kekuatan di perbatasan Natuna. Bakamla RI menjadi salah satu badan yang memiliki tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia (Bakamla RI, 2021). Pada tugas tersebut, maka wilayah Natuna Utara yang masih menjadi bagian yurisdiksi pemerintah Indonesia juga menjadi salah satu fokus perhatian Bakamla RI. Dinamika sengketa di LCS membuat kawasan tersebut rawan eskalasi yang dapat memberikan dampak langsung terhadap Indonesia, khususnya di wilayah perairan Natuna. Persoalan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak memiliki klaim sengketa di LCS dan tidak memiliki *overlapping jurisdiction* dengan Tiongkok. Namun, sengketa LCS mulai “menarik” Indonesia ke dalam pusarannya dan mengakibatkan persinggungan dengan kepentingan nasional Indonesia, khususnya di wilayah Laut Natuna Utara. Berdasarkan kepentingan nasional tersebut, Indonesia perlu mengamati geopolitik dan geostrategi yang terjadi di LCS agar dapat membuat strategi yang tepat dalam menghadapi eskalasi di kawasan sengketa tersebut. Strategi ini dilakukan Indonesia melalui upaya diplomasi dan penyiagaan kekuatan militer di perairan Natuna Utara. Dalam upaya menjaga keamanan perairan Indonesia memperkuat peran Bakamla dalam penanganan keamanan laut di Indonesia khususnya zona maritim barat Batam. (Felly, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas menjadi dasar pemikiran bagi penulis sehingga menetapkan judul: **Peran Bakamla Dalam Penanganan Keamanan Laut di Zona Maritim Barat.**

B. Fokus Permasalahan

Berawal dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Peran Bakamla Dalam Penanganan Keamanan Laut di Zona Maritim Barat Batam dilihat dari *Good Maritime Governance*.**

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

berikut ini adalah tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana Peran Bakamla dalam Penanganan Keamanan Laut di Zona Maritim Barat dengan mengidentifikasi masih rendahnya penanganan keamanan laut di zona maritim barat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat terhadap Akademik

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memajukan pemahaman dan memberikan wawasan baru tentang peran Bakamla dalam penanganan keamanan laut di zona maritim barat.

b. Manfaat terhadap Dunia Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai kontribusi bagi pelaksana penanganan keamanan laut di zona maritim barat.